

## TEMUAN BPK YANG ADI TUGAS TPTGR

JENIS KERUGIAN NEGARA	JUMLAH	BELUM TERTAGIH
◆ Dana Intensif DPRD 2004	Rp 1.263.282.000	Rp 1.113.220.000
◆ Dana Asuransi Jiwa DPRD	Rp 1.500.000.000	Rp 1.210.000.000
◆ Dana Penunjang Kegiatan	Rp 384.400.000	Rp 280.280.000
◆ Gaji ke-13 DPRD 2004-2009	Rp 107.291.000	Rp 72.053.100
◆ Kekurangan Mobil Dinas	Rp 99.586.624	Rp 35.704.653
<b>TOTAL DUIT BELUM TERTAGIH</b>		<b>RP 2.711.257.753</b>

# Anggota Dewan Dilaporkan Korupsi

**MAGELANG-** Setelah menarik diri dari pembahasan TPTGR bersama Pemkot, Kamis (12/8) kemarin gabungan LSM akhirnya secara resmi melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan anggota dewan 1999-2004 dan 2004-

2009. Laporan dikirim langsung oleh gabungan LSM kepada Kejaksaan Negeri Magelang. Berdasar data yang dilansir LSM, jumlah uang negara yang salah pos dan belum dikembalikan senilai Rp 2.711.257.753.

► Anggota **Anggota..** hal 9

## Dana Salah Pos

### ANGGOTA

Sambungan dari hal. 3

Ketua LSM Cicak, Bintoro Dwi Prasetyo menyebutkan data tersebut merupakan temuan audit BPK tahun 2007. Hasil audit tersebut menyebutkan, ada sejumlah aliran dana yang dikategorikan salah pos alias salah sasaran. Dana itu sendiri diketahui masuk ke kantong anggota DPRD Kota Magelang. Secara rinci ada lima temuan yang dirilis BPK.

"Masing-masing dana insentif, dana asuransi, gaji ke-13, kekurangan mobil dan dana penunjang kegiatan. Besarannya ada," kata Bintoro menunjukan nominal uang yang diketahui salah pos tersebut.

Karena salah sasaran, lantas BPK meminta Pemkot menarik kembali uang tersebut. Dengan demikian anggota dewan harus mengembalikan uang yang telah diterima ke kas daerah. Dalam praktiknya, Pemkot memberikan beban

kepada TPTGR untuk menarik uang tersebut.

"Sayangnya, hingga 2 tahun berakhir, tepatnya 28 Juli masih banyak anggota dewan yang tidak mengembalikan uang. Sementara masa kerja TPTGR habis. Dari sanalah, kami beranggapan ini masuk kategori kasus pidana khusus dan merugikan negara," kata Bintoro.

Atas anggapan itulah, LSM meminta serta mendesak, agar Kejaksaan Negeri segera mengusut dan menindaklanjutinya. "Masalah ini kita laporkan ke kejaksaan sebagai temuan kerugian negara yang harus selesaikan secara hukum pidana khusus," kata pria berambut pendek tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Magelang, Achmad Junaedi yang menerima rombongan LSM mengaku berterima kasih, dan akan segera menindaklanjuti temuan dan laporan tersebut." (Jlo/lis)